

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 10 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Komisi D Ingatkan Persoalan Penambangan Ilegal

PENAMBANGAN Sungai secara ilegal menjadi salah satu fokus Komisi DPRD Jawa Tengah. Alasannya, jika penambangan ilegal tak ditertibkan maka akan merusak alam serta mengganggu masyarakat sekitar.

Persoalan penambangan ilegal tak terjadi sekali saja, melainkan sudah berulang kali.

Beberapa waktu lalu bahkan Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat langsung di lokasi penambangan di Kali Gung Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

Pasalnya, penambangan di kali itu sudah memakan korban jiwa dan banyak menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

Dari pantauan tersebut, diketahui aliran sungai menjadi tidak beraturan sehingga mengakibatkan tanah menjadi longsor dan dasar sungai semakin turun.

Masalah lainnya adalah adanya bangunan pengairan yang jebol dengan posisi melintang di atas sungai (*ground shield*) yang sudah dibangun dengan anggaran APBD sekitar Rp 4 miliar pada 2016. Kondisi itu diakibatkan adanya pengambilan sirtu (pasir dan batu) ilegal yang tidak beraturan.

Dari persoalan di atas, ada 10 KK di sekitar aliran sungai yang terkena dampaknya. Warga tersebut harus direlokasi karena tanah yang ditempati beresiko longsor, terkikis akibat

penambangan di Kali Gung.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Samirun menyarankan agar akses untuk truk ke lokasi penambangan ditutup. Tak hanya di Kali Gung saja tapi juga penambangan ilegal lainnya.

Segera Dihentikan

"Penambangan itu sudah sangat serius dan harus segera dihentikan. Kita sampai tidak bisa tahu mana yang aliran sungai dan bukan. Kerukan dari material ini sudah semakin melebar dan bisa membahayakan, juga merugikan banyak pihak. Jadi, harus segera ditutup, diberi papan peringatan Dilarang Masuk Penambang Ilegal! dengan mencantumkan perda dan PP yang relevan," tegas Samirun yang saat kunjungan didampingi Kepala Balai PSDA (Pengelola Sumber Daya Air) Pemali Comal Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air & Penataan Ruang (Pusdataru).

Wahyudin Noor Aly, anggota Komisi D lainnya menambahkan, hal itu merupakan persoalan serius. Maka harus jadi perhatian semua pemangku kepentingan. Agar ke depan jangan ada lagi penambangan ilegal yang begitu merusak dan merugikan masyarakat.

Dinas Pusdataru Provinsi Jateng sendiri sudah pernah memberhentikan kegiatan penambangan ilegal tersebut dan diberi sanksi teguran. Namun, kondisi yang terjadi di lapangan berulang. (**Hanung Soekendro-56**)